

RINGKASAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BRANTAS (PERSPEKTIF KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR)

Permasalahan pengelolaan lingkungan pada umumnya merupakan problematika yang bersifat multi dimensi, lintas sektoral dan saling terkait dengan isu pembangunan. Pergeseran jumlah penduduk, kerusakan sumber daya alam, pencemaran lingkungan sudah sampai pada taraf yang dapat mengancam pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini pengelolaan air sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berpihak pada kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Karena sifatnya yang dinamis, maka pengelolaan air harus dilakukan secara utuh dari hulu sampai hilir dengan basis wilayah sungai tanpa dipengaruhi oleh batas wilayah administrasi yang dilalui.

Pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanganan pencemaran air sering terjadi konflik baik ditingkat Provinsi maupun di beberapa Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki mengeluarkan Kebijakan yang tertuang dalam Perda No 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Dikeluarkannya kebijakan tersebut disebabkan kondisi sumber-sumber air di Jawa Timur kualitasnya semakin menurun akibat kegiatan yang dilakukan manusia. Dengan Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 diharapkan pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya melalui upaya koordinasi antar Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Pengaliran Sungai (DPS). Koordinasi tersebut dilakukan secara terpadu melalui kerjasama antar daerah, baik antar Provinsi dengan Kabupaten/kota maupun antar Kabupaten/Kota itu sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing, termasuk di dalamnya berbagai instansi terkait, baik yang menyangkut rencana pemanfaatan air, perijinan pembuangan limbah maupun pembinaan dan pengawasan penataan.

Efek dari pola pengelolaan sumber daya air tersebut di atas, air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian secara serius dari semua pihak. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas sumber daya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Setiap pelaksanaan pembangunan seharusnya tetap berprinsip bahwa membangun haruslah membawa manfaat atau dengan kata lain pembangunan tersebut selalu berupaya menjaga dan memelihara kemampuan lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air memiliki nilai (biaya) ekonomis, selain nilai ekologi dan sosial budaya. Air merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan kepada Pemerintah. Pencemaran air perlu dikendalikan karena akibat pencemaran air dapat mengurangi ketersediaan sumber daya air yang diperlukan sebagai modal pembangunan, serta cemarnya air dapat menyebabkan kepada masyarakat umum. Upaya pengendalian pencemaran air yang efektif adalah harus dilakukan pada sumber-sumber pencemarnya.

Konflik sehubungan dengan terjadinya pencemaran air di wilayah DAS Brantas dan DPS selama ini dengan berbagai kasus-kasus pencemaran tersebut belum terselesaikan secara menyeluruh, sehingga dampaknya masih merugikan kepentingan umum di masyarakat. Berbagai pelanggaran yang dilakukan setiap usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan wilayah administrasi atau batas kewenangan antar daerah hendaknya dilakukan dengan pola-pola kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam MOU (*memorandum of understanding*) agar meminimalkan terjadinya konflik.

Pengendalian pencemaran air yang di kedepankan adalah tindakan preventif merupakan suatu langkah awal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat yang karena berbagai kebutuhan dan keinginan selalu cenderung menimbulkan konflik. maka perlu diperhatikan pencegahannya sebelum terjadi konflik. hal ini terkait dengan bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu tidak ada yang monopoli, adanya prinsip keadilan dengan tetap memperhatikan hak-hak kelompok minoritas dan lebih penting yaitu adanya pemimpin yang demokratis dan transparan dalam menjalankan kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam pengaturan tentang pengendalian pencemaran air dan peningkatan kebutuhan atas sumberdaya tersebut.

Tindakan pencegahan atau tindakan preventif di atas merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan dalam mengelola konflik yang bertujuan agar tidak terjadi konflik. Penerapan pembagian kekuasaan secara dini bisa mencegah terjadinya konflik dengan kekerasan, ketika Pemerintah bersifat lebih demokratis dan saling terbuka, konflik dengan kekerasan dapat dicegah, karena minoritas tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajukan kepentingannya.

SUMMARY

CONTROL OF WATER CONTAMINATION IN DRAINAGE BASIN REGION (DAS) BRANTAS (PERSPECTIVE AUTHORITY OF CONFLICT BETWEEN PROVINCE GOVERNMENT AND REGENCY/TOWN IN EAST JAVA)

Environmental management problem is generally problems having the character of multi dimension, the sector across and related each other with the development issues. Friction number of resident, experienced resource damage, environment contamination has come up into the level which can menace the continuation of development. Environment management, in this case water management as one of very experienced resource is important for human life require to be conducted wisely by paying attention to quality water management and control water contamination parting to the importance of recent generation and future generation. Because of dynamic in character, then water management must be done intact from upper course to lower course with the regional bases of river without influenced by regional boundary administration.

Environment management toward handling water contamination often happened conflict in province and also in some Regency/Town. Governmental Province appropriate with authority and responsible owned to release the policy decanted in Perda No 5 Year 2000 about Control of Water Contamination. The releasing of Policy caused by a water source condition in East Java its quality is downhill progressively effect of activity which done by human. With the Government Regulation of Indonesian Republic Number 82 year 2001 is expected water quality management to guarantee the water quality wanted according to its allotment through intergovernmental coordination effort of Area which in one union water ecosystem in Drainage Basin Region (DAS) And Area of River Flow (DPS). The Coordination done in wrought through interregional cooperation, goodness usher the Province with the Regency/town and also usher that Regency/town by itself according to each authority, inclusive of in it various related institution, both for concerning exploiting water plan, licensing of dismissal of waste and also construction and settlement observation.

Effect from pattern of management of water resource above mentioned, water become the problem which require to get the attention seriously from all party. To get the good water as according to certain standard, in this time become the costly goods, because water have a lot of impure by various waste from various result of human being activity. So that in resource water quality have experienced of degradation. That way also in amount unable to fulfill the requirement which increase. Every development execution ought to stable principled that develop shall bring the benefit or equally the development always cope to take care of and look after the environment ability by preventing the happening of environmental damage and contamination and also efficiency of experienced use source energy.

Water contamination is entry or its input the creature, substance, energy and or other component into water by activity of human being so that the water quality decrease to the certain level causing the water does not function again according to its function. Water contamination owns the economic cost, besides value of cultural social and ecology. Irrigate to represent the public property which authority mandate to Government. Water contamination requires to be controlled because effect of water contamination earned the less of availability of water resource needed by development capital, impure and also its water can cause to public society. To strive the control of contamination effective water must be done by soiled source.

Conflicts referring to the happening of water contamination in region of DAS Brantas and DPS during the time by various the contamination case has not yet been finished totally, so that its impact still harm public interest in society. Various infraction done by every effort and or activity having impact and important to environment While environment management related to region of administration or interregional boundary authority shall be done by the pattern of cooperation agreement poured in MOU (Memorandum Of Understanding) to be minimization the happening of conflict.

Control of water contamination which is placing forward preventive action represent a step earlier which require to be paid attention to society life which is because various requirement and desire always tend to generate the conflict, hence require to be paid attention to its prevention before the conflict happened. this matter is related with how mechanism of division of power or authority to do something that not monopolize, existence of justice principle fixed pay attention to the more important and minority group rights that is the existence of transparent and democratic leader in running its leadership in the centre of society, especially in arrangement about control of water contamination and make-up of requirement for the resource.

ABSTRAK

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BRANTAS (PERSPEKTIF KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR)

Perjalanan otonomi daerah setidaknya telah menghasilkan berbagai perubahan dalam struktur dan tata pemerintahan di Indonesia, dan berimplikasi luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat pada pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil elaborasi dinamika hubungan antar level pemerintahan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dengan mengkaji implikasi terhadap lingkungan, maka fenomena yang terjadi akibat perubahan-perubahan berbagai kebijakan di era otonomi daerah itu bisa diabstraksikan pada konflik pencemaran air yang terjadi di Jawa Timur.

Kewenangan yang dilakukan baik Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup masih terasa belum konsisten dan masih terjadi kepentingan dari semua pihak sektor yang terjadi masih ego otonomi. sehingga terlihat bahwa pemberlakuan sanksi administrasi yang sudah diterapkan terhadap beberapa perusahaan yang sebagai potensi pencemar, namun belum ada tindak lanjut secara serius. terlihat bahwa setelah dilakukan peringatan-peringatan maupun tegoran ternyata terbukti pencemaran masih saja terjadi.

Pengendalian pencemaran air yang di kedepankan adalah tindakan preventif merupakan suatu langkah awal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat yang karena berbagai kebutuhan dan keinginan selalu cenderung menimbulkan konflik. maka perlu diperhatikan pencegahannya sebelum terjadi konflik, hal ini terkait dengan bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu tidak ada yang monopoli, adanya prinsip keadilan dengan tetap memperhatikan hak-hak kelompok minoritas dan lebih penting yaitu adanya pemimpin yang demokratis dan transparan dalam menjalankan kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam pengaturan tentang pengendalian pencemaran air dan peningkatan kebutuhan atas sumberdaya tersebut.

Kata kunci : Konflik Kewenangan, Pengendalian Pencemaran Air.

ABSTRACT

CONTROL OF WATER CONTAMINATION IN DRAINAGE BASIN REGION (DAS) BRANTAS (PERSPECTIVE AUTHORITY OF CONFLICT BETWEEN PROVINCE GOVERNMENT AND REGENCY/TOWN IN EAST JAVA)

Autonomous transportation of area at least has yielded various change in structure and arrange the governance in Indonesia, and have wide implication to various sector of society life of environment management, from result of elaboration of dynamics link usher the level governance in Center, Province And Regency/Town. and also with studying implication to environment. hence phenomenon that happened effect of changes of various policy in autonomous era that area can be abstracted at water contamination conflict that happened in East Java.

Authority is conducted by goodness Province of East Java and also Regency/Town in environment management still be felt inconsistent and still be happened importance from all sector party that happened ego still be autonomous. so that seen by treating administration sanction is applied to some company which is as soiled potency, but not yet is follow-up seriously. seen that after done by commemoration and also summons in the reality proven by the contamination still be happened.

Control of water contamination which is placing forward preventive action represent a step earlier which require to be paid attention to society life which is because various requirement and desire always tend to generate the conflict, hence require to be paid attention to its prevention before the conflict happened. this matter is related with how mechanism of division of power or authority to do something that not monopolize. existence of justice principle fixed pay attention to the more important and minority group rights that is the existence of transparent and democratic leader in running its leadership in the centre of society, especially in arrangement about control of water contamination and make-up of requirement for the resource.

Keywords : Authority Conflict, Control Of Water Contamination